

Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Dan Akuntabilitas Lingkungan Pada Mal Ratu Indah Makassar

Nun Fadilah Salam ¹⁾

Email: nunfadilah@stienobel-indonesia.ac.id

¹⁾ Dosen Akuntansi, STIE Nobel Indonesia Makassar

(Diterima: 1 Desember 2018; direvisi: 20 Februari-2019; dipublikasikan: 08 April-2019)



©2018 –Bongaya Journal for Research Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

This study aimed to investigate the role of stakeholders in environmental accountability and management practices on the Ratu Indah Makassar Mall. This study used a phenomenological approach in which the researcher collected data using participant observation to find out the essential phenomena of participants in their life experiences. The study began from October 2018 to March 2019. The data collection method used interviews with HRD Staff, Operational Section Head and GreenShip Manager about the role of stakeholders in environmental accountability and management, observation of stakeholders involvement in environmental accountability and management and documentation. The data analysis method used the analysis of Miles and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of the study showed that the role and engagement of stakeholders in environmental accountability and management, both in the form of participation, cooperation, supervision and inspection can strengthen relations between companies and stakeholders, create customer satisfaction and comfort, improve environmental performance and contribute to the development and business sustainable.

Keywords: Stakeholders, Management, Environmental Accountability

copyright © 2019 Stiem Bongaya. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan bukan hanya menjadi masalah di suatu daerah atau negara tetapi juga menjadi masalah di seluruh dunia yang harus segera diatasi. Banyak faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah akibat dari aktivitas operasional perusahaan, baik perusahaan manufaktur, pertambangan maupun jasa. Kegiatan perusahaan di satu sisi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui penyediaan kebutuhan masyarakat dan lapangan pekerjaan, namun di sisi lain dapat berdampak buruk bagi lingkungan, seperti pencemaran udara, air dan tanah (Harahap, 1999).

Di Indonesia, permasalahan lingkungan merupakan hal penting yang membutuhkan penanganan serius mengingat efek dari buruknya pengelolaan lingkungan semakin

nyata dewasa ini. Gejala ini dapat diamati dari berbagai bencana yang terjadi, seperti banjir bandang di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jakarta, tanah longsor di Desa Sijeruk Jawa Tengah dan daerah-daerah lainnya di Jawa dan Sumatera, serta kebakaran hutan di hutan lindung Kalimantan. Bahkan munculnya banjir lumpur bercampur gas sulfur di daerah Sidoarjo Jawa Timur merupakan bukti kurangnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dari kegiatan industrinya. Fakta ini merupakan implikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai sektor industri (Sambharakreshna, 2009).

Perhatian pada lingkungan sebenarnya timbul akibat berbagai dorongan dari pihak eksternal perusahaan (Berry dan Rondinelli, 1998), antara lain: pemerintah, konsumen dan kompetitor. Untuk menindaklanjuti berbagai

desakan ini, maka perlu dibuat pendekatan secara proaktif dalam mengurangi dampak lingkungan yang terjadi. Hasil akhir tindakan proaktif manajemen lingkungan tersebut adalah tercapainya kinerja lingkungan perusahaan yang lebih baik.

Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir dalam mengidentifikasi dan menanggapi masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan (Dyer dan Singh, 1998; Frooman, 1999; Post *et al.*, 2002). Ini dilihat dari peningkatan perhatian dan tekanan pada organisasi untuk mengelola kinerja dan persepsi pemangku kepentingan tentang kinerja melalui pelaporan eksternal (Patten, 1992). Perusahaan memiliki beragam pemangku kepentingan potensial dan mengadopsi media yang berbeda untuk melibatkan mereka (Adams dan Frost, 2006). Beberapa perusahaan mengambil langkah lebih jauh dan menggunakan internet sebagai bagian dari strategi keterlibatan pemangku kepentingan yang melibatkan interaksi dinamis sebagai harapan mengenai peran perusahaan sehubungan dengan perubahan pemangku kepentingan (Andriof *et al.*, 2002b).

Organisasi mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat luas atas dampak kegiatan mereka pada lingkungan alam dan masyarakat, serta akuntabilitas melibatkan pelaporan kepada masyarakat (Cooper, 1992; Gray, 1992; Henderson, 1991; Lehman, 1995; Lehman, 1999; Maunders & Burritt, 1991; Harte & Owen, 1987; Gray *et al.*, 1996). Sebagai bagian dari sistem sosial, perusahaan seharusnya melaporkan pengelolaan lingkungan perusahaannya dalam laporan tahunan. Hal ini karena berkaitan dengan tiga elemen penting, yaitu: kelangsungan aspek ekonomi, lingkungan dan pencapaian sosial. Kendalanya adalah pelaporan lingkungan dalam *annual report* di sebagian negara termasuk Indonesia masih bersifat sukarela (Sambharakreshna, 2009; Belal, 2015).

Laporan lingkungan dibuat untuk menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang tanggung jawab lingkungan perusahaan, memastikan keterbukaan bisnis dan menciptakan reputasi mitra yang bertanggung jawab yang memberikan kontribusi terhadap lingkungan, perlindungan dan kualitas hidup masyarakat setempat (Krivačić and Janković, 2017). Sebuah prasyarat untuk pelaporan lingkungan

yang baik adalah pembentukan prosedur manajemen lingkungan dan juga landasan untuk setiap akuntansi lingkungan yang substantif (Gray *et al.*, 2014). Oleh karena itu, integrasi dan sinergi antara sistem manajemen lingkungan dan akuntansi lingkungan diperlukan dalam aspek lingkungan. Pengungkapan informasi lingkungan dapat dilihat sebagai sebuah alat, yang dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya lingkungan yang bernilai (Batra, 2013). Pelaporan lingkungan dapat dianggap sebagai praktik bisnis yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengatasi masalah lingkungan (Krivačić and Janković, 2017).

Belal (2002) meneliti tentang laporan keberlanjutan dari 17 perusahaan di Inggris menggunakan akuntabilitas sebagai tolak ukur untuk menganalisis praktik keterlibatan pemangku kepentingan di perusahaan. Belal menemukan bahwa sebagian besar perusahaan mengidentifikasi pemangku kepentingan mereka, namun perusahaan tidak mempromosikan akuntabilitas pemangku kepentingan yang ideal. Sebaliknya, perusahaan menggunakan keterlibatan pemangku kepentingan sebagai alat legitimasi dan untuk mengelola pemangku kepentingan secara efektif. Hasil penelitiannya juga menunjukkan kualitas keterlibatan pemangku kepentingan yang buruk dan keengganan untuk mengimplementasikan umpan balik yang diterima.

Penelitian Kaur dan Lodhia (2018) yang membahas tentang keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaporan dan akuntansi keberlanjutan pada dewan lokal Australia dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam seluruh proses pelaporan dan akuntansi keberlanjutan, pengembangan rencana strategis dan indikator keberlanjutan, pengukuran kinerja keberlanjutan dan penyusunan laporan keberlanjutan. Selain itu, penelitian Manetti (2011), Frost *et al.* (2012) dan Imoniana *et al.* (2012) menemukan bahwa pemangku kepentingan memiliki peran yang terbatas dalam pengembangan dan peningkatan pelaporan keberlanjutan. Hasil penelitian mereka juga menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan akuntansi.

Pentingnya pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan perlu ditekankan untuk semua jenis perusahaan termasuk mal atau pusat

perbelanjaan. Mal Ratu Indah sebagai salah satu mal terbesar di kota Makassar menghasilkan limbah dan sampah yang sangat banyak setiap harinya. Untuk itu, Mal Ratu Indah wajib memperhatikan dan mengelola lingkungannya dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah peran pemangku kepentingan dalam praktik pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan pada Mal Ratu Indah Makassar?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi peran pemangku kepentingan dalam praktik pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Triple Bottom Line

Triple Bottom Line dikemukakan oleh Elkington pada tahun 1997. Pada dasarnya, TBL adalah konstruksi lain yang menunjukkan perluasan agenda lingkungan dengan cara mengintegrasikan bidang ekonomi dan sosial (Elkington, 1997). TBL menyediakan kerangka kerja untuk mengukur kinerja bisnis dan keberhasilan perusahaan menggunakan bidang ekonomi, sosial dan lingkungan (Goel, 2010). Istilah ini juga disebut sebagai kerangka kerja praktis berkelanjutan (Rogers dan Hudson, 2011). Agenda TBL menempatkan fokus yang konsisten dan seimbang pada nilai ekonomi, sosial dan lingkungan yang disediakan oleh perusahaan (Alhaddi, 2015).

a. Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi TBL mengacu pada dampak praktik bisnis organisasi pada sistem ekonomi (Elkington, 1997). Hal ini berkaitan dengan kemampuan ekonomi sebagai salah satu subsistem keberlanjutan untuk bertahan hidup dan berkembang di masa depan untuk mendukung generasi mendatang (Spangenberg, 2005).

b. Bidang Sosial

Bidang sosial TBL mengacu pada praktik bisnis yang menguntungkan dan adil untuk tenaga kerja, sumber daya manusia dan masyarakat (Elkington, 1997). Fokusnya adalah praktik-praktik ini dapat memberikan nilai kepada masyarakat.

c. Bidang Lingkungan

Bidang lingkungan TBL mengacu pada praktik bisnis yang tidak merusak lingkungan untuk generasi mendatang. Ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya energi yang efisien,

mengurangi emisi gas rumah kaca dan meminimalkan jejak ekologis (Goel, 2010).

Teori Stakeholders

Teori pemangku kepentingan adalah bagian dari sekelompok teori yang berdasarkan sistem masyarakat. Teori pemangku kepentingan pada awalnya adalah teori manajemen (Freeman, 1984). Ullmann (1985) mendeskripsikan masalah pemangku kepentingan secara instrumental dengan menggunakan model tiga dimensi. Model pemangku kepentingan yang digunakan oleh Ullmann adalah kekuatan pemangku kepentingan, postur strategis dan kinerja ekonomi.

Roberts (1992) menyatakan bahwa kekuatan pemangku kepentingan berarti bahwa “perusahaan akan responsif terhadap intensitas tuntutan pemangku kepentingan”. Kekuatan pemangku kepentingan dilihat sebagai atribut paling penting dalam hubungan pemangku kepentingan dan perusahaan (Van der Laan Smith *et al.*, 2005). Mitchell *et al* (1997) menunjukkan model untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan arti penting pemangku kepentingan. Pentingnya pemangku kepentingan dipandang sebagai gabungan dari atribut kekuasaan pemangku kepentingan, urgensi dan legitimasi.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan dapat didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan (Freeman, 1984). Meskipun demikian, hubungan pemangku kepentingan mewakili jaringan hubungan yang kompleks yang tidak dapat diwakili oleh interaksi satu dimensi antara organisasi dan pemangku kepentingan tertentu (Post *et al.*, 2002). Hubungan organisasi dan pemangku kepentingan telah meluas hingga mencakup keterkaitan yang ada di antara para pemangku kepentingan, misalnya, kelompok-kelompok masyarakat yang melobi pemerintah untuk pengaturan kegiatan perusahaan yang lebih besar. Banyak inisiatif dalam dialog pemangku kepentingan yang telah melibatkan organisasi non-pemerintah (LSM) melalui berbagai bentuk aliansi dan kolaborasi (Lawrence, 2002; Rondinelli dan London, 2002).

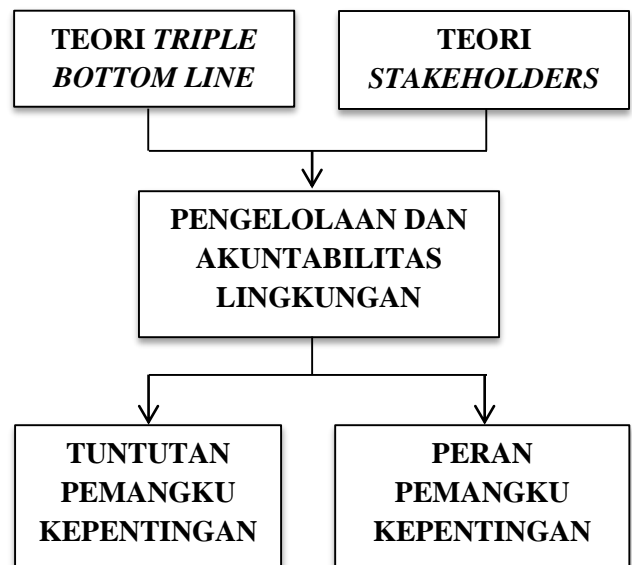
Laporan tahunan menjadi sarana utama yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan para pemangku

kepentingan dan terdapat banyak perubahan dalam pola pengungkapan perusahaan. Perubahan-perubahan ini telah menanggapi perubahan peraturan (tidak terbatas pada peraturan pelaporan), perubahan dalam keprihatinan dan harapan masyarakat, dan sebagai akibat dari peristiwa yang telah meningkatkan perhatian publik terhadap operasi dan kinerja perusahaan (Buhr, 1998; Patten, 1992).

Kerangka Konseptual

Perusahaan dalam melakukan aktivitasnya harus memperhatikan 3 aspek yaitu *profit*, *people* dan *planet* yang dikenal dengan 3P. Perusahaan diharapkan bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga dapat berkontribusi pada bidang sosial dan lingkungan. Bidang sosial dan lingkungan memerlukan perhatian serius mengingat banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Karena masalah tersebut, maka perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan.

Akuntabilitas lingkungan terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dan dampak yang ditimbulkan atas aktivitas tersebut terhadap sistem ekologi (Siskawati dan Santi, 2009). Maunders dan Burritt (1991) menyatakan bahwa kerusakan lingkungan terus berlangsung dan ini meningkatkan akuntabilitas lingkungan perusahaan agar bisa membantu untuk mengatasi krisis lingkungan tersebut. Pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan dipicu oleh datangnya tekanan dari berbagai pemangku kepentingan agar perusahaan lebih peduli dengan lingkungannya dan ini semakin memberikan motivasi kepada perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah perusahaan yang bersih. Peran dan keterlibatan pemangku kepentingan juga dibutuhkan dalam pengelolaan dan akuntabilitas.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

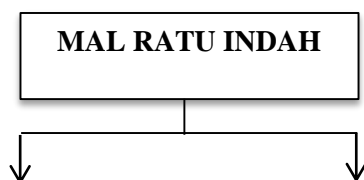
METODE

Pendekatan Penelitian, Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya (Creswell, 2009). Obyek dalam penelitian ini adalah peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan. Informan dalam penelitian ini adalah Staf HRD, Kepala Bagian Operasional dan Manajer *Greenship*. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di Mal Ratu Indah Makassar. Penelitian dimulai dari bulan Oktober 2018 sampai Maret 2019. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan Staf HRD, Kepala Bagian Operasional dan Manajer *Greenship* tentang peranan *stakeholders* dalam pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan, observasi terhadap keterlibatan *stakeholders* dalam pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan, serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen maupun literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.



Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman (1984). Dalam analisis data Miles dan Huberman, tahapan pertama peneliti melakukan pengumpulan data, selanjutnya mereduksi data, menyajikan data dan tahapan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman (1984). Dalam analisis data Miles dan Huberman, tahapan pertama peneliti melakukan pengumpulan data, selanjutnya mereduksi data, menyajikan data dan tahapan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam kegiatan perusahaan dengan sasaran yang spesifik dan jelas. Keterlibatan pemangku kepentingan memang merupakan tema inti dalam teori *stakeholder*. Bergantung pada jenis dan kepentingan pemangku kepentingan, kegiatan perusahaan dapat berhubungan dengan masyarakat, layanan pelanggan, pemasok, akuntansi manajemen, manajemen sumber daya manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, keterlibatan dapat dilihat sebagai mekanisme untuk mencapai persetujuan atau bekerja sama, partisipasi, metode untuk meningkatkan kepercayaan, wacana untuk meningkatkan keadilan atau sistem tata kelola perusahaan (Greenwood, 2007).

Untuk mengenali dan menangani kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, Reed (1999) mengelompokkan pemangku kepentingan ke dalam kelompok internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal adalah mereka yang bekerja di dalam organisasi dan memiliki tanggung jawab formal. Contoh pemangku kepentingan internal adalah karyawan dan manajer. Di samping itu, pemangku kepentingan eksternal adalah individu dan kelompok yang tidak dipekerjakan

oleh suatu organisasi tetapi mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan organisasi. Contohnya adalah pelanggan, pemerintah dan masyarakat setempat. Klasifikasi ini berguna ketika memeriksa kontribusi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses pelaporan dan akuntansi.

1. Peran Pemangku Kepentingan Internal Dalam Pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf HRD tentang peran pemangku kepentingan internal dalam pengelolaan lingkungan, beliau menjelaskan:

“Manajemen MARI membuat anggaran biaya lingkungan, kemudian diajukan ke departemen pengadaan, kemudian pengajuan tersebut diteruskan ke pihak *finance* untuk diproses”.

Manajemen Mal Ratu Indah menyusun anggaran biaya lingkungan dan mengajukan anggaran tersebut ke departemen pengadaan. Selanjutnya pengajuan itu diproses oleh bagian keuangan.

Kepala Bagian Operasional MARI memaparkan tentang peran bagian operasional. “Kita kontrol penggunaan alat-alat seperti eskalator dan *lift*, dan kami awasi pengelolaan lingkungan di MARI termasuk limbah dan sampahnya”.

Bagian operasional berperan dalam pengaturan penggunaan eskalator dan *lift*. Bagian operasional juga mengawasi pengelolaan lingkungan di MARI. Kepala Bagian Operasional menambahkan:

“Khusus untuk AC dilakukan oleh *engineering* karena sistem AC kami masih manual jadi harus dinyalakan satu per satu WPU (*Water Packaged Unit*) di setiap lantai. Bagian *engineering* juga menangani limbah cair”.

Bagian *engineering* berperan dalam pengaturan penggunaan *Air Conditioner* dan pengolahan limbah cair. Kepala Bagian Operasional juga menjelaskan tentang peran petugas kebersihan.

“*Cleaning service* bertugas menjaga kebersihan di MARI. Sebelum bertugas *cleaning service* akan di *briefing* oleh *supervisor* dan para *leader*. Materi *briefing* mulai dari cara kerja, SOP dan pelayanan”.

Petugas kebersihan berperan dalam menjaga kebersihan di MARI. Petugas kebersihan akan diberikan pengarahan tentang cara kerja, SOP dan pelayanan oleh pengawas dan pimpinan sebelum mereka bekerja.

Selain itu, manajer *greenship* menambahkan:

“Sebagai manajer *greenship* adalah bagaimana menjadikan gedung berwawasan lingkungan, pengawasan pemakaian energi, air untuk efisiensi air dan energi dan memperpanjang usia pemakaian gedung”.

Manajer *greenship* berperan dalam menjadikan gedung berwawasan lingkungan, pengawasan pemakaian energi dan air untuk memastikan efisiensi penggunaannya dan memperpanjang usia pemakaian gedung.

2. Peran Pemangku Kepentingan Eksternal Dalam Pengelolaan Lingkungan

Pemangku kepentingan eksternal juga memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Operasional:

“Kami bekerja sama dengan mal sampah. Mal sampah membeli sampah yang bisa didaur ulang sehingga MARI berkurang sampahnya dan mal sampah mendapatkan sampah yang bisa didaur ulang. Kami juga mensosialisasikan ke *tenant-tenant* agar menjual sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang silahkan buang ke kontainer. Untuk sampah makanan, kita buang ke kontainer sebagai penyimpanan sementara dan selanjutnya dibuang ke TPA”.

MARI bekerja sama dengan mal sampah dimana mal sampah akan membeli sampah yang dapat didaur ulang yang dihasilkan oleh MARI. Manajemen MARI mensosialisasikan kepada seluruh penyewa agar menjual sampah yang dapat didaur ulang dan sebaliknya sampah yang tidak dapat didaur ulang agar dibuang ke kontainer sampah. Kerja sama MARI dan mal sampah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dimana mal sampah mendapatkan sampah yang dapat didaur ulang sedangkan MARI mendapatkan keuntungan secara finansial dan pengurangan sampah. Bentuk kerja sama ini bisa menjadi salah satu cara untuk penanganan masalah sampah.

Berdasarkan hasil observasi, pengunjung dan masyarakat juga menjadi bagian dalam pengelolaan lingkungan. Pengunjung dan masyarakat berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya orang yang bermukim di sekitar MARI, tetapi juga pedagang kaki lima, pengemudi becak motor, toko ataupun restoran yang berada di sekitar MARI. Meskipun

demikian, masih banyak pengunjung dan masyarakat yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Selain itu, Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dan pemeriksaan lingkungan. Pengawasan dan pemeriksaan lingkungan dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan tidak membahayakan lingkungan dan memastikan ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan.

3. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Akuntabilitas Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer *greenship* tentang akuntabilitas lingkungan, beliau menjelaskan:

“Pelaporan lingkungan dilakukan 6 bulan sekali. Ada pelaporan RKL RPL. RKL itu Rencana Kelola Lingkungan dan RPL itu Rencana Pelestarian Lingkungan. Dalam penyusunan RKL RPL melibatkan masyarakat misalnya pak lurah, RT atau RW sebagai salah satu narasumber untuk mengajukan RKL RPL. Kita juga melibatkan pakar lingkungan dan kantor dinas. Kita melibatkan mereka agar mereka mengetahui bahwa ada rencana pembangunan gedung. Ada juga UKL UPL. UKL Usaha Kelola Lingkungan dan UPL Usaha Pelestarian Lingkungan. Dalam dokumen UKL UPL itu terdapat data kualitas air limbah, tingkat kebisingan udara, emisi CO₂ dan limbah B3 contohnya lampu bekas, oli, aki, solar”.

MARI memberikan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar setiap 6 bulan sekali. Dalam penyusunan RKL dan RPL, pihak MARI melibatkan masyarakat, pakar lingkungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Pelibatan masyarakat dilakukan agar mereka mengetahui rencana pembangunan gedung. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, disebutkan bahwa pengikutsertan masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan kegiatan serta konsultasi publik. Masyarakat juga berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan kegiatan.

Pelaporan pelaksanaan RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pelestarian Lingkungan) serta UKL (Usaha

Kelola Lingkungan) dan UPL (Usaha Pelestarian Lingkungan) merupakan suatu bentuk akuntabilitas perusahaan atas pengelolaan lingkungan hidup. Dari pelaporan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dapat mengawasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Masyarakat juga dapat membantu Dinas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan sehubungan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi, MARI merupakan bagian dari PT. Kalla Inti Karsa dimana PT. Kalla Inti Karsa adalah salah satu anak perusahaan Kalla Group. Kalla Group telah mempublikasikan laporan *Corporate Social Responsibility* pada *website* perusahaan. Dalam laporan CSR tersebut, perusahaan menjalankan program pengembangan keislaman, mutu pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan CSR ini tentunya membutuhkan partisipasi dari masyarakat.

PEMBAHASAN

Pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan di MARI. Pemangku kepentingan terdiri dari pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal yang berperan dalam pengelolaan lingkungan di MARI adalah manajemen, bagian operasional, *engineering*, petugas kebersihan dan manajer *greenship*. Manajemen berperan dalam pembuatan anggaran biaya lingkungan, bagian operasional berperan dalam pengaturan penggunaan eskalator dan *lift* serta mengawasi pengelolaan lingkungan di MARI, bagian *engineering* berperan dalam pengaturan penggunaan *Air Conditioner* dan pengolahan limbah cair, petugas kebersihan berperan dalam menjaga kebersihan, manajer *greenship* berperan dalam menjadikan gedung berwawasan lingkungan, pengawasan pemakaian energi dan air untuk memastikan efisiensi penggunaannya dan memperpanjang usia pemakaian gedung.

Pemangku kepentingan eksternal yang berperan dalam pengelolaan lingkungan di MARI adalah mal sampah, pengunjung, masyarakat dan pemerintah. Mal sampah berkolaborasi dengan MARI dimana mal sampah membeli sampah yang dapat didaur ulang yang dihasilkan oleh MARI. Bentuk

kolaborasi ini dapat menjadi salah satu solusi untuk penanganan sampah. Pengunjung dan masyarakat berperan dalam menjaga kebersihan. Namun demikian, masih banyak pengunjung dan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan komunikasi dan mengedukasi masyarakat secara langsung tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup serta mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Pemerintah berperan dalam pengawasan dan pemeriksaan lingkungan.

Sebagai bentuk akuntabilitas lingkungan, MARI memberikan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar setiap 6 bulan sekali. Dalam penyusunan RKL dan RPL, MARI melibatkan masyarakat, pakar lingkungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Pelibatan masyarakat dilakukan agar masyarakat mengetahui rencana usaha dan kegiatan. Dari pelaporan lingkungan tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat menilai dan mengawasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan.

Pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan yang baik akan berdampak pada kepuasan dan kenyamanan pelanggan serta dapat mewujudkan pembangunan dan bisnis berkelanjutan. Keterlibatan pemangku kepentingan baik dalam bentuk partisipasi, kolaborasi, pengawasan dan pemeriksaan dapat mempererat hubungan antara pemangku kepentingan dan perusahaan. Selain itu, penilaian kinerja lingkungan perusahaan melalui pelaporan lingkungan dapat memotivasi perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja lingkungannya.

Organisasi membutuhkan kerja sama dari para pemangku kepentingan mereka untuk mengidentifikasi masalah sosial dan lingkungan. Akuntansi dan pelaporan keberlanjutan dapat memberikan dasar untuk mengelola hubungan pemangku kepentingan yang kompleks dan beralih ke operasi yang lebih berkelanjutan (Ball, 2002). Misalnya, penelitian Yau (2012) tentang daur ulang sampah di Hongkong dimana TPA menjadi langka sehingga disarankan untuk mempromosikan perilaku daur ulang limbah di masyarakat.

Keterlibatan pemangku kepentingan yang berkualitas dalam pelaporan keberlanjutan dan proses akuntansi menghasilkan solusi kreatif untuk mengatasi masalah pemangku kepentingan (Lawrence, 2002), meningkatkan daya tanggap, transparansi, dan akuntabilitas (Brown dan Hicks, 2013; GRI, 2013) dan membangun ikatan yang lebih erat dengan para pemangku kepentingan yang tertarik pada kinerja keberlanjutan (Hörisch *et al.*, 2015).

Barone *et al* (2013) menemukan bahwa upaya perusahaan untuk terlibat dengan pemangku kepentingan terbatas pada pengelolaan reputasi karena kurangnya komunikasi langsung dengan pemangku kepentingan. Namun demikian, Rinaldi *et al* (2014) mengembalikan kebutuhan untuk mengembangkan dan menggunakan mekanisme dialog demokratis untuk memberdayakan berbagai pemangku kepentingan secara berurutan untuk berkontribusi secara efektif pada praktik keberlanjutan, termasuk akuntansi keberlanjutan dan pelaporan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemangku kepentingan memiliki peran yang vital dalam pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan. Peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan adalah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pengawasan dan audit lingkungan. Pelaporan lingkungan adalah bentuk akuntabilitas perusahaan atas pengelolaan lingkungan hidup. Melalui pelaporan lingkungan, masyarakat dan pemerintah dapat menilai dan mengawasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Manajemen MARI melibatkan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pelestarian Lingkungan (RPL). Pelibatan masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan kegiatan serta konsultasi publik. Masyarakat dapat mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan kegiatan. Selain itu, terkait dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan.

Keterlibatan pemangku kepentingan

dalam pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan, baik dalam bentuk partisipasi, kerja sama, pengawasan dan audit lingkungan dapat mempererat hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan, menciptakan kepuasan dan kenyamanan pelanggan, meningkatkan kinerja lingkungan serta berkontribusi pada pembangunan dan bisnis berkelanjutan.

Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menginvestigasi peran *stakeholders* dalam pengelolaan dan akuntabilitas lingkungan pada perusahaan manufaktur.

DAFTAR RUJUKAN

- Adams, C.A. dan Frost, G.R. 2006. The internet and change in corporate stakeholder engagement and communication strategies on social and environmental performance, *Journal of Accounting and Organizational Change*, Vol. 2, No. 3, 281-303.
- Alhaddi, H. 2015. Triple Bottom Line and Sustainability: A Literature Review. *Business and Management Studies*, Vol. 1, No. 2, 6-10.
- Andriof, J., Waddock, S., Husted, B. dan Sutherland Rahman, S. 2002b. Introduction, in Andriof, J., Waddock, S., Husted, B. and Sutherland Rahman, S. (Eds), *Unfolding Stakeholder Thinking*, Greenleaf Publishing Limited, Sheffield.
- Ball, A. 2002. *Sustainability Accounting in UK Local Government: An Agenda for Research*, Association of Chartered Certified Accountants, London.
- Barone, E., Ranamagar, N. and Solomon, J.F. 2013. A Habermasian model of stakeholder (non)engagement and corporate (ir)responsibility reporting. *Accounting Forum*, Vol. 37, No. 3, 163-181.
- Batra, G.S. 2013. Environmental management and environmental disclosures: A comparison of corporate practices across Malaysia, Singapore and India. *South Asian Journal of Management*, Vol. 20, No. 1, 62-96.
- Belal, A. 2015. Social and Environmental Accountability in Developing Countries. In D. Jamali, C. Karam and M. Blowfield (Ed.), *Development-Oriented CSR*, Vol 1: 153-166, Sheffield: Greenleaf Publishing.
- Belal, A.R. 2002. Stakeholder accountability or stakeholder management: a review of UK firms' social and ethical accounting, auditing

- and reporting (SEAAR) practices. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, Vol. 9, No. 1, 8-25.
- Berry, M.A. dan Rondinelli, D.A. 1998. Proactive Corporate Environmental Management: A New Industrial Revolution. *Academy of Management Executive*, Vol. 12, No. 2, 38-50.
- Brown, L. dan Hicks, E. 2013. Stakeholder engagement in the design of social accounting and reporting tools, in Mook, L. (Ed.), *Accounting for Social Value*. University of Toronto Press, Toronto.
- Buhr, N. 1998. Environmental performance, legislation and annual report disclosure: the case of acid rain and Falconbridge. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 11, 163-190.
- Cooper, C. 1992. The non and nom of accounting for mother nature. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 5, No. 3, 16-39.
- Creswell, J.W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage.
- Dyer, J.H. dan Singh, H. 1998. The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. *Academy of Management Review*, Vol. 23, No. 4, 660-790.
- Elkington, J. 1997. *Cannibals with forks – Triple bottom line of 21st century business*. Stoney Creek, CT: New Society Publishers.
- Freeman, R.E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Pitman, Boston, MA.
- Frooman, J. 1999. Stakeholder influence strategies. *Academy of Management Review*, Vol. 24, 191-205.
- Frost, G., Jones, S. dan Lee, P. 2012. The measurement and reporting of sustainability information within the organization: a case analysis, in Jones, S. and Ratnatunga, J. (Eds.). *Contemporary Issues in Sustainability Accounting, Assurance and Reporting*. Emerald, Bingley, 197-225.
- Goel, P. 2010. Triple bottom line reporting: An analytical approach for corporate sustainability. *Journal of Finance, Accounting, and Management*, Vol. 1, No. 1, 27-42.
- Gray, R. 1992. Accounting and environmentalism: an exploration of the challenge of gently accounting for accountability, transparency, and sustainability. *Accounting, Organizations & Society*, Vol. 17, No. 5, 399-425.
- Gray, R., Adams, C.A. dan Owen, D. 2014. *Accountability, social responsibility and sustainability*. Harlow. Pearson Education.
- Gray, R., Owen, D., dan Adams, C. 1996. *Accounting & Accountability*. London: Prentice Hall.
- Greenwood, M. 2007. Stakeholder Engagement: Beyond the Myth of Corporate Responsibility. *Journal of Business Ethics*, Vol. 74, 315–327. [CrossRef]
- GRI. 2013. *Sustainability Reporting Guidelines: Version 4*, Global Reporting Initiative, Amsterdam.
- Harahap, S.S. 1999. *Teori Akuntansi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Harte, G., dan Owen, D.L. 1987. Fighting de-industrialisation: the role of Local Government social audits. *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 12, No. 2, 123-142.
- Henderson, H. 1991. New Markets, New Commons, New Ethics: A Guest Essay. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 4, No. 3, 72-80.
- Hörisch, J., Schaltegger, S. dan Windolph, S.E. 2015. Linking sustainability-related stakeholder feedback to corporate sustainability performance: an empirical analysis of stakeholder dialogues. *International Journal of Business Environment*, Vol. 7, No. 2, 200-218.
- Imoniana, J.O., Domingos, L.C., Soares, R.R. dan Tinoco, J.E.P. 2012. Stakeholders' engagement in sustainability development and reporting: evidence from Brazil. *African Journal of Business Management*, Vol. 6, No. 42, 10634-10644.
- Kaur, A., dan Lodhia, S. 2018. Stakeholder engagement in sustainability accounting and reporting: A study of Australian local councils. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 31, Issue: 1, 338-368.

- Krivačić, D. dan Janković, S. 2017. Managerial Attitudes on Environmental Reporting: Evidence from Croatia. *Journal of Environmental Accounting and Management*, Vol. 5, No. 4, 327-341.
- Lawrence, A.T. 2002. The drivers of stakeholder engagement: reflections on the case of Royal Dutch/Shell, in Andriof, J., Waddock, S., Husted, B. and Sutherland Rahman, S. (Eds), *Unfolding Stakeholder Thinking*, Greenleaf Publishing Limited, Sheffield.
- Lehman, G. 1995. A Legitimate concern for environmental accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 6, No. 5, 393-412.
- Lehman, G. 1999. Disclosing new worlds: a role for social and environmental accounting and auditing. *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 24, No. 3, 217-241.
- Manetti, G. 2011. The quality of stakeholder engagement in sustainability reporting: empirical evidence and critical points. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, Vol. 18, No. 2, 110-122.
- Maunder, K., dan Burritt, R. 1991. Accounting and ecological crisis. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 4, No. 3, 9-26.
- Miles, M.B., dan Huberman, A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage.
- Mitchell, R.K., Agle, B.R. dan Wood, D.J. 1997. Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, Vol. 22, No. 4, 853-960.
- Patten, D.M. 1992. Intra-industry environmental disclosures in response to the Alaskan oil spill: a note on legitimacy theory. *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 17, 471-500.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Post, J.E., Preston, L.E. dan Sachs, L. 2002. Managing the extended enterprise: the new stakeholder view. *California Management Review*, Vol. 45, 6-28.
- Reed, D. 1999. Stakeholder management theory: a critical theory perspective. *Business Ethics Quarterly*, Vol. 9, No. 3, 453-483.
- Rinaldi, L., Unerman, J. dan Tilt, C. 2014. The role of stakeholder engagement and dialogue within the sustainability accounting and reporting process, in Beggington, J., Unerman, J. and O'Dwyer, B. (Eds.). *Sustainability Accounting and Accountability*. Routledge, Abingdon, 86-107.
- Roberts, R.W. 1992. Determinants of corporate social disclosure: an application of stakeholder theory. *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 17, No. 6, 595-612.
- Rogers, K., dan Hudson, B. 2011. The triple bottom line: The synergies of transformative perceptions and practices of sustainability. *OD Practitioner*, Vol. 4, No. 43, 3-9.
- Rondinelli, D.A. dan London, T. 2002. Stakeholder and corporate responsibilities in cross-sectoral environmental collaborations: building value, legitimacy and trust, in Andriof, J., Waddock, S., Husted, B. and Sutherland Rahman, S. (Eds), *Unfolding Stakeholder Thinking*, Greenleaf Publishing Limited, Sheffield.
- Sambharakreshna, Yudhanta. 2009. Akuntansi Lingkungan dan Akuntansi Manajemen Lingkungan: Suatu Komponen Dasar Strategi Bisnis. *Jurnal Infestasi*, Vol. 5, No. 1, 1-21.
- Siskawati, E., dan Santi, E. 2009. Akuntabilitas Lingkungan pada PT Semen Padang dalam Perspektif *Legitimacy Theory*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 4, No. 1, 41-57.
- Spangenberg, J.H. 2005. Economic sustainability of the economy: Constructs and indicators. *International Journal of Sustainable Development*, Vol. 8, No. 1/2, 47-64.
- Ullmann, A.A. 1985. Data in search of a theory: a critical examination of the relationships among social disclosure, and economic performance of US firms. *Academy of Management Review*, Vol. 10, No. 3, 540-570.
- Van der Laan Smith, J., Adikhari, A. dan Tondkar, R.H. 2005. Exploring differences in social disclosures internationally: a stakeholder perspective. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 24, No. 2, 123-51.
- Yau, Y. 2012. Stakeholder engagement in waste recycling in a high-rise setting. *Sustainable Development*, Vol. 20, No. 2, 115-127.